At-Tafahum

Vol. 8 No. 2 (2024) pp. 122-132

ISSN : 2580-4707 (online) - 2549-0159(cetak)
https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/attafahum/index

STRATEGIC STUDY OF INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT ON THE ECONOMY OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES IN TEBING TINGGI CITY FROM AN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE

Kajian Strategis Pembangunan Infrastruktur Terhadap Perekonomian Masyarakat Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Tebing Tinggi Perspektif Hukum Islam

Tetty Marlina Tarigan[1], M. Rizal[2]
[1,2)] Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Kata Kunci :

Infrastructure,
Economy,
UMKM

Abstract:

Economic improvement is a method or process with various efforts to make humans have power and strength as a continuous process to build their living abilities. The development of better infrastructure such as internal communications is an example of the importance of coordination for development, including decentralizing the role and authority of developing a joint framework. The aim of this research is to determine the strategic impact of infrastructure development on the economic level of the Micro, Small and Medium Enterprises community in Tebing Tinggi city from an Islamic legal perspective. This research method is qualitative research, namely research that uses both deductive and inductive inference processes as well as analytical analysis of the dynamics of relationships between analytical and analytical methods which are researched using scientific logic. The introduction of qualitative research is mainly based on carrying out the research process through formal analytical thinking principles. The results of the research are that the availability of infrastructure is one of the factors driving regional productivity. Economic growth in the city of Tebing Tinggi has not been inclusive. Infrastructure development in the city of Tebing Tinggi encourages economic growth, road infrastructure increases access to employment opportunities and more equal distribution of income.

This is an open access article under the CC BY license.

Corresponding Author:
tettymarlina@uinsu.ac.id
Email: tettymarlina@uinsu.ac.id , mrizal6000@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam kajian Islam, Para ahli dalam wacana pemikiran ekonomi Islam klasik sekarang prihatin dengan masalah ekspansi ekonomi dalam studi Islam. Kemajuan ekonomi adalah proses berkelanjutan yang melibatkan berbagai kegiatan untuk memberi orang lebih banyak

kekuatan dan kekuatan sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Mengenai hal ini, Allah SWT menyatakan dalam Q.S. Al Jumuah ayat 10 yang artinya: "Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung[1].”

Menurut prinsip-prinsip Islam, kemajuan ekonomi adalah kemajuan yang stabil dari faktor-faktor produksi yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan semua orang. Dalam pandangan Islam, pertumbuhan ekonomi bukan hanya soal peningkatan kuantitas produksi, tetapi juga terkait dengan nilai-nilai etis yang mendasarinya. Oleh karena itu, suatu peningkatan produksi tidak dapat dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi sejati jika hasil produksi tersebut berisiko membahayakan atau merugikan manusia, seperti barang-barang yang memberikan efek buruk bagi kesehatan atau lingkungan. Pertumbuhan ekonomi dalam Islam harus selaras dengan prinsip-prinsip moral dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan umat manusia[2].

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Pusat memiliki sejumlah rencana kegiatan pembangunan nasional, antara lain di bidang pekerjaan umum, pemeliharaan pertahanan dan keamanan, keadilan, dan ekonomi. Hal yang sama berlaku untuk daerah, kabupaten, dan kota tingkat II, serta pemerintah daerah tingkat I, yang merupakan provinsi. Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kemudian mengubah undang-undang tersebut[3], namun diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001 telah memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya masing-masing.

Pembangunan infrastruktur yang lebih baik seperti komunikasi internal adalah contoh pentingnya koordinasi dan koordinasi untuk pembangunan, antara lain desentralisasi peran dan wewenang pengembangan kerangka kerja bersama. Desentralisasi tugas dan tanggung jawab, termasuk keuangan dari semua sektor pembangunan sebagai modal kerja. Sektor swasta memainkan peran penting dalam mengembangkan infrastruktur yang kompetitif dan menguntungkan karena memiliki keunggulan komparatif atas sektor publik dalam hal teknis,

[1] Anggi Maharani Nasution, Nadia Ulfa, dan Nurhayati Harahap, “Strategi Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan,” *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen* 2, no. 1 (2024): 213.
[2] Musthafa Syukur, “Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Islam,” *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan* 2, no. 2 (2018): 33–51.
[3] Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010).

keuangan dan managerial[4]. Sumber keuangan dapat berasal dari bank, lembaga keuangan, lembaga keuangan bukan bank, organisasi bisnis (PMDN, PMA, BUMN, BUMD) dan sumber lainnya. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, kebijakan INPRES Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional mengatur menngenai peningkatan partisipasi swasta dalam pembangunan dan penyediaan infrastruktur.

Proses pembangunan ekonomi daerah meliputi pembentukan lembaga baru, pertumbuhan industri alternatif, peningkatan kemampuan tenaga kerja untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih berkualitas, penemuan pasar baru, penyebaran pengetahuan, dan pendirian bisnis baru. Tujuan dari semua inisiatif ini adalah untuk memberi penduduk setempat akses ke berbagai pilihan pekerjaan yang semakin banyak. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan kesempatan kerja yang lebih luas dan menciptakan keberagaman ekonomi yang lebih stabil.

Menurut *Macmillan Dictionary of Modern Economics*, infrastruktur adalah elemen struktural dalam ekonomi yang memfasilitasi aliran barang dan jasa antara pembeli dan penjual. Sementara itu, The Routledge Dictionary of Economics memberikan definisi yang lebih luas, menyatakan bahwa infrastruktur juga mencakup pelayanan utama dari suatu negara yang mendukung kegiatan ekonomi dan masyarakat, dengan cara menyediakan fasilitas transportasi dan sarana pendukung lainnya yang memungkinkan kelancaran aktivitas ekonomi dan sosial[5].

Permbangunan infrastruktur berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak pembangunan infrastruktur ekonomi, khususnya infrastruktur jalan, sarana air rumah tangga, dan ketersediaan listrik rumah tangga di kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Utara. Menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional adalah tujuan utama dari pembangunan infrastruktur ini, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan di kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara.

[4] M. Amin Abdullah, *Neo Ushul Fiqh Menuju Ijtihad Kontemporer; Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh Dan Dampaknya Pada Fiqh Kontemporer* (Fakultas Syariah UIN SuKa, 2004).
[5] Rifyal Zuhdi Gultom dan Annisa Qadarusman Tini, "Pembangunan Infrastruktur dalam Islam: Tinjauan Ekonomi dan Sosial," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020): 202–2011.

Namun demikian, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Sumatera Utara dapat memperburuk ketimpangan meskipun terjadi ekspansi ekonomi. Jika semua hal lain tetap sama, kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen dapat mengakibatkan peningkatan kesenjangan pendapatan sebesar 0,01 persen. Hasil ini sejalan dengan kenyataan bahwa perekonomian Sumatera Utara masih sangat bergantung pada sektor pertanian. Menurut teori Kuznets, ini menandakan bahwa ekonomi Sumatera Utara masih berkembang dan dalam tahap awal. Pada tahun 2022, perekonomian Kota Tebing Tinggi mengalami peningkatan sebesar 4,01%, yang menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021 yang tercatat sebesar 2,51%. Menurut pendekatan produksi lapangan usaha, sektor informasi dan komunikasi tumbuh pada tingkat tercepat (9,35%), diikuti oleh sektor transportasi dan pergudangan (9,33%), serta sektor pelayanan kesehatan dan kegiatan sosial (8,91%). Sektor konstruksi yang berkontribusi 14,49%, sektor industri pengolahan yang berkontribusi 12,27%, dan sektor perdagangan besar dan eceran yang berkontribusi 24,68% merupakan tiga sektor yang mendominasi perekonomian Kota Tebing Tinggi pada tahun 2022.

Pembangunan infrastruktur jalan tol yang sudah ada selama ini mulai dari kota Medan sampai kota Tebing Tinggi lalu dilanjutkan pengerjaan pembangunan jalan tol Kuala Binge-Tebing Tinggi-Prapat dengan mengadopsi beberapa teknologi canggih dan menggunakan 2 kebudayaan ini telah memberi dampak bagi masyarakat sekitarnya. Khususnya masyarakat yang melaksanakan kegiatan perekonomian melalui kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah[6].

Peran masyarakat dalam pembangunan nasional, utama dalam pembangunan ekonomi adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, selanjutnya disingkat dengan UMKM. UMKM mampu bertahan sebagai penyangga perekonomian masyarakat yang mampu menciptakan berbagai lapangan pekerjaan dan mampu menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Seperti sepanjang jalan medan-tebing tinggi terlihat lapak pedagang penjual lemang. Deretan lapak para penjual lemang terlihat di sepanjang ruas jalan Negara tersebut memiliki potensi usaha yang cukup baik. Lemang telah menjadi ciri khas daerah ini sehingga permintaannya akan tetap ada. Selain lemang ada juga jenis oleh-oleh khas kota Tebing Tinggi lainnya yaitu kue kacang dengan berbagai rasa dan berbagai jenis makanan ringan lainnya yang juga tergolong sebagai jenis oleh-oleh khas kota. Usaha tersebut selalu mendapat perhatian dari

[6] Abdul Halim dan Gozalli ar rozzaq, *Kontribusi dan efektifitas Retribusi Jasa Umum Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah* (Surakarta: USM, 2009).

pemerintah kota setempat agar dapat memberikan peningkatan perekonomian masyarakat kota Tebing Tinggi.

Maqashid sharia, sebuah prinsip hukum Islam yang memainkan peran penting dalam keberadaan manusia, dapat digunakan untuk mempelajari masalah ini untuk memperluas cakupannya. Tanpa ilmu syariah maqashid, orang tidak dapat memahami mengapa mereka harus hidup sesuai dengan syariah. Setelah menggabungkan ijtihad, ihtisan, dan istihlah, mujtahid menggunakan syariah maqashid dalam istinbath hukum ketika tidak ada bukti Al-Qur'an atau as-Sunnah dalam tatanan sistem modern di masyarakat. Syariah maqashid dapat membantu mujtahid dalam menegakkan hukum sesuai dengan norma masyarakat. Dengan adanya beberapa pertimbangan tersebut peneliti bertujuan melakukan penelitian dengan judul "Kajian Strategis Pembangunan Infrastruktur Terhadap Tingkat Perekonomian Masyarakat Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Tebing Tinggi Prespektif Hukum Islam"[7]

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menekankan pada proses penyimpulan secara deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antarvariabel dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif berfokus pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara berpikir formal dan argumentatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan tertulis terkait dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah (historical approach) yang memfokuskan kajian pada objek penelitian untuk kemudian ditafsirkan dalam kerangka teori, serta pendekatan interpretatif (interpretative approach) yang bertujuan mengungkap dimensi filosofis dan pola pikir yang melahirkan ketentuan peraturan yang berlaku. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi. Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder yang digolongkan menjadi dua, yaitu bahan primer berupa undang-undang dan peraturan yang terkait, serta bahan sekunder lainnya yang mendukung penelitian.[8]

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menerapkan strategi kompetitif yang tepat, yang mencakup pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien, dapat meningkatkan dan memperkuat daya saing. Selain itu, pilihan

[7] Ariani, Utomo, dan Mohamad Nur, "Kajian Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tarakan," *Jurnal Organisasi dan Manajemen* 13, no. 2 (2017): 99–118.
[8] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2017).

taktik yang sesuai harus sejalan dengan setiap aktivitas operasi bisnis untuk menghasilkan kinerja terbaik, melampaui ekspektasi, dan menambah nilai. Semua bisnis, tetapi UMKM khususnya, berusaha untuk menjadi yang terbaik di bidangnya, sehingga mereka harus berdaya saing tinggi dan selalu berusaha untuk perbaikan. Hal ini ditunjukkan oleh sumber daya manusia yang dapat diandalkan, penguasaan informasi yang mendalam, dan pemahaman yang kuat tentang ekonomi.

Selanjutnya, UMKM perlu memanfaatkan teknologi informasi guna memperkuat daya saingnya, mengingat semakin ketatnya persaingan di era digital saat ini. Salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing UMKM adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Langkah ini bertujuan untuk membuka peluang ekspor dan berbagai peluang bisnis lainnya. Dalam konteks ini, pengembangan UMKM harus difokuskan pada analisis daya saing dan perumusan langkah-langkah untuk meningkatkan daya saing, sebagai bagian dari upaya membangun daya saing yang lebih kuat serta mendukung perekonomian nasional[9].

Temuan penelitian ini memberikan model strategi untuk meningkatkan daya saing UMKM dalam menghadapi persaingan internasional. Rencana utama yang diperoleh dari pemeriksaan internal dan eksternal UMKM di Kota Tebing Tinggi adalah strategi pertumbuhan *(growth)*. UMKM kota ini memanfaatkan kemampuan internal masing-masing, yang meliputi menjaga kualitas bahan baku, menjamin legalitas dan izin produk yang memenuhi regulasi, menjaga harga yang kompetitif, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan UMKM. Karena pergeseran penggunaan lahan, sektor pertanian—terutama hortikultura dan tanaman pangan menunjukkan perlambatan pertumbuhan. Namun, industri perkebunan yang merupakan mayoritas sektor pertanian Sumatera Utara juga mengalami perlambatan[10].

Salah satu aspek penting dalam mendorong pertumbuhan inklusif adalah penciptaan lapangan kerja baru, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin. Seseorang dapat menjalani kehidupan yang terhormat dan setara dengan bekerja dan mendapatkan gaji yang cukup. Di Kota Tebing Tinggi, penciptaan lapangan kerja baru dalam lima tahun terakhir menunjukkan hasil yang positif. Namun, seiring dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi,

[9] syaakir sofyan, "Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia," *Bilancia* 11, no. 1 (2017): 33–64.
[10] Badan Pusat Statistik, "Pertumbuhan Ekonomi Kota Tebing Tingga,", t.t., https://tebingtinggikota.beta.bps.go.id/id/pressrelease/2023/10/05/125/pertumbuhan-ekonomi-kota-tebing-tinggi-tahun-2022.html.

tahun 2015 mencatatkan pertumbuhan ekonomi terendah dalam periode tersebut. Penurunan penyerapan tenaga kerja ini diduga disebabkan oleh peralihan tenaga kerja ke sektor jasa, yang memiliki kontribusi lebih kecil terhadap perekonomian Kota Tebing Tinggi dibandingkan dengan sektor pertanian dan industri[11].

Sejumlah temuan dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa berbagai masalah yang dihadapi pelaku UMKM adalah akar alasan rendahnya daya saing UMKM. Pemasaran, modal dan pendanaan yang terbatas, inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi yang rendah, masalah pemilihan bahan baku, peralatan produksi yang tidak memadai, penyerapan dan pemberdayaan tenaga kerja, perencanaan pengembangan bisnis yang kurang optimal, dan kesiapan yang terbatas untuk menghadapi tantangan eksternal adalah beberapa masalah utama yang dihadapi UMKM, menurut penelitian yang dilakukan di Kota Tebing Tinggi. Menentukan dampak dari rencana untuk mendongkrak perekonomian masyarakat UMKM adalah tujuan dari upaya penelitian ini. Untuk mencapai tujuan tersebut, tugas utama akan diselesaikan dalam dua tahap mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat UMKM sebagai akibat dari pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan jalan tol Medan-Tebing Tinggi.

Pada langkah pertama, kegiatan yang akan dilakukan adalah mengumpulkan informasi terkait permasalahan yang dihadapi UMKM dalam upaya meningkatkan daya saing. Informasi ini akan diperoleh melalui pengumpulan data, yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari sumber peraturan yang berlaku serta hasil penelitian sebelumnya, sementara data sekunder diperoleh melalui wawancara dengan responden, yaitu masyarakat UMKM yang berperan sebagai pedagang UMKM. Untuk mengolah data yang terkumpul, baik primer maupun sekunder, akan digunakan analisis deskriptif. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM[12].

Identifikasi hambatan yang di hadapi dalam mengetahui dampak pembangunan infrastruktur terhadap perekonomian masyarakat UMKM di Kota Tebing Tinggi.

Faktor internal dan eksternal biasanya berkontribusi pada tantangan dan masalah yang dihadapi UMKM. Alasan internal antara lain modal yang tidak memadai, kurangnya sarana

[11] Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tebing Tinggi, *Laporan Akhir Analisis Ekonomi Makro Kota Tebing Tinggi*, 2021.
[12] Ariani, Utomo, dan Nur, "Kajian Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tarakan."

dan prasarana yang memadai, kurangnya keahlian mengenai sistem pemasaran, ketersediaan tenaga kerja atau sumber daya manusia (SDM), manajemen yang masih mendasar dan tidak efektif, serta terbatasnya uang tunai. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang belum dimanfaatkan secara optimal juga menjadi tantangan tersendiri[13].

Berikut ini adalah beberapa masalah dan tantangan dengan manajemen internal dan eksternal, serta bagaimana pembangunan infrastruktur mempengaruhi bagaimana pelaksanaan kegiatan usaha dilakukan:

1. Pelaku UMKM memiliki modal terbatas.
2. Pelaku UMKM tidak memiliki keahlian atau pemahaman tentang bagaimana memulai dan menjalankan bisnis di bidang usaha,
3. Infrastruktur dan fasilitas yang tidak memadai untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan bisnis UMKM.

Adanya hambatan secara eksternal seperti

1. Pelaku UMKM memiliki sedikit pengetahuan tentang sistem, prosedur, dan taktik pemasaran yang digunakan untuk mempromosikan barang-barang mereka.
2. Kurangnya pengetahuan mengenai pengembangan usaha bagi UMKM di Kota Tebing Tinggi, serta kurangnya pemahaman birokrasi bisnis untuk menembus pasar yang lebih besar di luar pasar lokal.[14]

Analisis Identifikasi dan Deskripsi Pengembangan Usaha

Penciptaan strategi pengembangan UMKM sebagai langkah praktis untuk meningkatkan daya saing dalam menghadapi persaingan pasar bebas tercakup dalam pemeriksaan ini dalam beberapa cara. Pada titik ini, pemasaran, pendanaan modal dan bisnis, teknologi informasi dan inovasi, bahan baku, peralatan produksi, penyerapan dan pemberdayaan tenaga kerja, organisasi dan manajemen bisnis, birokrasi, dan peran pemerintah semuanya harus dipertimbangkan. Isu eksternal, seperti dampak pembangunan infrastruktur jalan tol Medan-Tebing Tinggi, juga harus diperhatikan.

[13] Gultom, Rifyal Zuhdi, Annisa Qadarusman Tini. (2020). Pembangunan Infrastruktur dalam Islam : Tinjauan Ekonomi dan Sosial. Jurnal Ilmiah EkonomiIslam, 6 (2), 203-211

[14] Ferry Fauzi, Maria Yosepin Endah Listyowati, dan Anisa Lestari, "Legalitas Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah(UMKM)Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pager Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo," *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 6 (2024): 7571–81.

1. Aspek Pemasaran

   Dalam aspek pemasaran, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, termasuk produk, harga, lokasi, promosi, dan faktor-faktor lainnya.

2. Aspek Modal dan Pendanaan Usaha

   Menurut temuan analisis, modal pribadi dan pinjaman—yang diperoleh melalui kolaborasi dan dukungan, termasuk bantuan UMKM dari instansi afiliasi—menjadi sumber utama modal UMKM. Namun, hanya sejumlah kecil UMKM yang memilih opsi kerja sama ini karena banyak yang meyakini bahwa pendapatan bisnisnya sangat rendah, yang berarti penambahan modal dari kemitraan masih cukup terbatas.

3. Aspek Peralatan Produksi

   Bagi pelaku UMKM di Tebing Tinggi, apakah mereka sudah beralih ke teknologi kontemporer atau masih menggunakan cara lama, peralatan produksi adalah salah satu aset mereka yang paling berharga. Barang tidak bergerak dan bergerak keduanya termasuk dalam peralatan produksi. Tidak mungkin bagi pelaku UMKM untuk menumbuhkan dan mengoperasikan perusahaannya seefisien mungkin tanpa peralatan produksi yang memadai.

4. Aspek Birokrasi dan Peran Pemerintah

   Salah seorang pelaku UMKM, ibu Suleha sebagai pekerja yang menjual lemang disalah satu lapak di pinggir gerbang keluar toll jalan lintas kota Tebing Tinggi saat diwawancarai terkait peran pemerintah daerah dan mengenai sistem birokrasi yang diberlakukan, maka menurut beliau pemerintah daerah setempat telah membuat kebijakan kapada para pelaku UMKM mulai dari izin mendirikan lapak atau kios dengan tertib sehingga tidak mengurangi ketertiban masyarakat umumnya.

5. Aspek Eksternalitas dan Lain-lain

   Eksternalitas mencakup dampak yang dirasakan oleh pelaku UMKM, baik positif maupun negatif. Dari aspek ini, tingkat inflasi berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi UMKM dan masyarakat sekitar. Meskipun terdapat hambatan seperti persaingan usaha dan ketidakstabilan politik yang dapat menghambat perkembangan UMKM di Tebing Tinggi, eksternalitas positif lebih dominan. Dampak positif ini mendukung pertumbuhan UMKM, karena hanya sebagian kecil usaha yang terganggu

oleh faktor eksternal ini[15].

KESIMPULAN

Salah satu elemen kunci dalam mempromosikan produksi regional adalah aksesibilitas infrastruktur. Untuk menurunkan pengangguran dan meningkatkan infrastruktur ekonomi yang diperlukan untuk mendukung sektor riil, pemerintah memprioritaskan untuk mengalokasikan pendanaan infrastruktur melalui pendanaan Negara dan Daerah. Melalui pendekatan ini, diharapkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial dapat ditekan. di kota Tebing Tinggi, pertumbuhan ekonomi telah berkontribusi pada pengurangan kemiskinan (pro-poor). Namun, pertumbuhan tersebut belum mampu menciptakan kesempatan kerja yang cukup luas dan justru memperburuk ketimpangan, sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah ini masih belum inklusif. Meski demikian, pembangunan infrastruktur terutama jaringan jalan, telah mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki akses terhadap peluang kerja serta mendukung distribusi penghasilan yang lebih merata.

Agar Tebing Tinggi lebih berhasil dalam mengurangi kemiskinan, pertumbuhan ekonomi harus didorong, dengan penekanan pada penciptaan lapangan kerja. Mempermudah investor untuk meluncurkan perusahaan di wilayah tersebut adalah salah satu strategi. Bantuan konsumtif, dukungan keuangan langsung tersebut, harus dialihkan oleh pemerintah ke bantuan yang lebih produktif, termasuk pelatihan kerja untuk masyarakat kurang mampu serta pendampingan dan pendanaan UMKM. Selain itu, pemerintah harus menciptakan lebih banyak jalan untuk investasi swasta, terutama investasi domestik, terutama di sektor infrastruktur. Perpanjangan jalan raya harus dipertahankan untuk memberikan aksesibilitas populasi ke berbagai kemungkinan pekerjaan, yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan pembangunan yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Purnomo Setiady, dan Husaini Usman. *Metodelogi Penelitian Sosial*. 2 ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Bandung: CV Diponegoro, 2010.

Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syari'ah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.

ketiga, Wijayah, Adi Rastono, dan Marsusi. *Pertumbuhan Carica (Carica pubescens) yang Ditanam Secara Tumpangsari dengan Ubi Jalar (Ipomoea batatas L.) dan dan Cabai Rawit*

[15] Dio Cornelius dan Wiwin Priana Primandhana, "Analisis Pengaruh Infrastruktur Jalan, Listrik, dan Air Terhadap Produk Domestik Regional," *Bruto Kinerja : Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 19, no. 2 (2022): 338–44.

(Capsicum frustescens L) Di Lereng Gunung Lawu. Universitas Sebelas Maret: Surakarta, 2018.

Lestariningsih, Ari. *Penerapan Akad Muzara'ah dalam Praktik Kerja Sama Pertambakan Ikan (Studi Pada pulo Duduksampeyan Gresik*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.

Muslich, Ahmad Warid. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2015.

Ningsih, Prillia Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021.

Pak Ruslan. Wawancara, 13 November 2023.

Ramadhani, Rahmat. *Dasar-Dasar Hukum Agraria*. Medan: Pustaka Prima, 2019.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Volume 12*. Jakarta: Lentera Hati, 2010.

Sinaga, Dini Ramadani. : ": Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin (Studi di Kabupaten Simalungun)." *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2022, 15. http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/18694.

Suhendi, Heri. *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Sunarto, Achmad, dan Syamsudin. *Himpunan Hadits Shahih Bukhori*. Jakarta: Annur Press, 2008.

Surata, I Gede. *Reformasi Hukum Agraria Bagi Petani Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative, 2016.

Surtinah, Neng Susi, dan Sri Utami Lestari. "Optimasi Lahan Dengan Sistem Tumpang Sari Jagung Manis (Zea Mays Saccharata, Sturt) dan Kangkung Sutra (Ipomea Reptans) di Pekanbaru." *Jurnal Ilmiah Pertanian* 12, no. 2 (2016): 62–72. https://doi.org/10.31849/jip.v12i2.987.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Syuja, Abu. *Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghayah Al-Ikhtishar Syarh Matn Abi Syuja,Kairo*. Kairo: : Ad-Darul Alamiyyah, t.t.

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.